



**LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA  
TANJUNGBALAI TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2018.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kota yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2018 mengacu pada Visi dan Misi Kota Tanjungbalai, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai tahun 2016 - 2021.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2018, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Tanjungbalai, 26 Maret 2019

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**



**M. SYAHRIAL, SH, MH**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Daerah .....	4
1.3 Gambaran Umum Penduduk .....	10
1.4 Struktur Organisasi .....	11
1.5 Kondisi dan proyeksi ekonomi Kota Tanjungbalai .....	13
1.6 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	15
1.7 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	16
1.8 Arah kebijakan Belanja Daerah.....	19
1.9 Ruang Lingkup.....	19
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	21
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ...	21
2.2 Visi dan Misi Kota Tanjungbalai .....	23
2.3 Tujuan dan Sasaran .....	26
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan .....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	37
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 .....	37
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	40
3.3 Informasi Keuangan Tahun 2018 .....	59
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	61

### LAMPIRAN

### 1.1. Latar Belakang

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan *Good Governance*. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sektor dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman serta sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Tingkat Provinsi dan Nasional.

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II ) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Disamping itu Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja (SAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai dan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai yang menjadi laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintahan Kota Tanjungbalai kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2018.

Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 ;
11. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018.

## 1.2. Gambaran Umum Daerah

### a. Letak Geografis

Kota Tanjungbalai berada di kawasan pesisir Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada 2°58'15" – 3°01'32" Lintang Utara dan 99°48'00" – 99°50'16" Bujur Timur dan berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka.

Letak wilayah Kota Tanjungbalai secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Asahan yang rinciannya seperti tertera pada Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Batas Wilayah Administrasi Kota Tanjungbalai**

No	Uraian	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan
2.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
3.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
4.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

**Sumber: BPS Kota Tanjungbalai.**

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kab/Kota beserta masyarakatnya untuk mengemban tugas dan tanggungjawab yang lebih luas, baik dalam bidang urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Sebagai implikasi dari otonomi tersebut, berdasarkan Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 22 Februari tentang pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar, maka wilayah Kota Tanjungbalai menjadi 6 Kecamatan dan 31

Kelurahan. Adapun Kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai beserta luasnya dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

**Tabel 1.2**  
**Luas Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Datuk Bandar	5	2.249	37,16
2.	Datuk Bandar Timur	5	1.457	24,08
3.	Tanjungbalai Selatan	6	198	3,27
4.	Tanjungbalai Utara	5	84	1,39
5.	Sei Tualang	5	809	13,36
6.	Raso Teluk Nibung	5	1.255	20,74
<b>Jumlah</b>		31	6.052	100,00

**Sumber: BPS Kota Tanjungbalai**

Terlihat bahwa Kecamatan Datuk Bandar merupakan Kecamatan terluas yakni 37,16% dari total luas wilayah Kota Tanjungbalai. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara 1,39%. Sementara daftar nama Kelurahan per Kecamatan terdapat pada tabel 1.3 berikut ini :

**Tabel 1.3**  
**Nama Kelurahan dan Kecamatan se Kota Tanjungbalai**

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Datuk Bandar	1. Sijambi 2. Pahang 3. Sirantau 4. Gading 5. Pantai Johor
2.	Datuk Bandar Timur	6. Pulau Simardan 7. Semula Jadi 8. Selat Tanjung Medan 9. Selat Lancang 10. Bunga Tanjung
3.	Tanjungbalai Selatan	11. Tanjungbalai Kota I 12. Tanjungbalai Kota II 13. Indra Sakti 14. Pantai Burung 15. Karya 16. Perwira

No	Kecamatan	Kelurahan
4.	Tanjungbalai Utara	17. Tanjungbalai Kota III 18. Tanjungbalai Kota IV 19. Sejahtera 20. Mata Halasan 21. Kualo Silo Bestari
5.	Sei Tualang Raso	22. Sei Raja 23. Pasar Baru 24. Muara Sentosa 25. Sumber Sari 26. Keramat Kubah
6.	Teluk Nibung	27. Pematang Pasir 28. Perjuangan 29. Sei Merbau 30. Beting Kuala Kapias 31. Kapias Pulau Buaya

**Sumber: BPS Kota Tanjungbalai**



### **c. Hidrologi**

Kondisi wilayah Kota Tanjungbalai sangat strategis karena terletak di pinggir Sungai Asahan dan bermuara ke Selat Malaka. Kota Tanjungbalai berada pada pertemuan dua sungai yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau, namun masih ada beberapa sungai besar dan kecil yang membelah kota. Sungai-sungai kecil lainnya antara lain adalah Sungai Pematang, Sungai Merbau, Sungai Kapias dan Sungai Raja yang bermuara ke Sungai Asahan dan Sungai Silau.

### **d. Potensi Pengembangan Wilayah**

#### **Potensi Penggunaan Lahan**

Berdasarkan hasil survey lapangan, jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari penggunaan lahan terbangun sebesar 57,31 % dan lahan non terbangun 42,69 %. Jenis lahan terbangun yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari bangunan perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan sosial, industri dan lain-lain. Sedangkan jenis lahan non terbangunnya, antara lain persawahan, perkebunan rakyat, kebun campuran dan lain-lain.

Sampai dengan tahun 2018, jumlah penggunaan lahan tertinggi di Kota Tanjungbalai adalah untuk lahan perkebunan (pertanian) yaitu seluas 2.507,429 Ha sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah untuk sarana kesehatan yaitu 0,5 Ha.

#### **Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Pola Ruang**

Pengembangan wilayah ke depan berdasarkan rencana pola ruang yang terkait dengan pengembangan potensi ekonomi terbagi atas kawasan budidaya, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan dan kawasan pariwisata.

Direncanakan sampai dengan tahun 2030 jenis budidaya yang terdapat di Kota Tanjungbalai meliputi budidaya pertanian dan budidaya perkotaan dengan luas wilayah 5.072,49 Ha atau 83,83%. Kawasan perdagangan dan jasa menjadi kawasan yang mendominasi kegiatan di pusat kota dengan luasan yang direncanakan sebesar 339,72 Ha yang terdiri dari pasar tradisional yang terdapat di setiap Pusat Pelayanan Kota (PPK), pusat perbelanjaan di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan pusat pertokoan modern di Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Sampai tahun 2030 arahan pengembangan kawasan perkantoran diarahkan ke Kelurahan Pahang (Kecamatan Datuk Bandar/SPPK 1) untuk kawasan perkantoran pemerintahan. Sementara kawasan Perkantoran Swasta

diarahkan bersatu di pusat-pusat perdagangan dan jasa atau kegiatan perekonomian lainnya, seperti : PPK (Pusat Pelayanan Kota), pusat-pusat perdagangan di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor, Sirantau (SPPK 1).

Pengembangan kawasan industri di Kota Tanjungbalai pada prinsipnya sudah berkembang di hampir diseluruh sub pusat pelayanan kota, antara lain industri besar/ sedang tersebar di SPPK 1 (Kelurahan Pahang, Sirantau dan Pantai Johor), SPPK 3 (Kelurahan Keramat Kubah dan Sumber Sari) dan SPPK 4 (Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kapias Pulau Buaya, Sei Merbau dan Pematang Pasir). Sampai tahun 2030 pengembangan industri (*aglomerasi*) dan pergudangan diarahkan :

- Kawasan Industri (*aglomerasi* industri) diarahkan di Kelurahan Sei Raja (Kecamatan Sei Tualang Raso/SPPK 3) dengan luas 232,718 Ha,
- Kawasan Pergudangan diarahkan di Kelurahan Beting Kuala Kapias dan Sungai Merbau (Kecamatan Teluk Nibung/SPPK 4) dengan luas 66,66 Ha.

Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Tanjungbalai diarahkan dengan potensi wisata budaya, wisata buatan dan wisata alam. Sampai tahun 2030 jenis kegiatan pariwisata dan arahan lokasi wisata tersebut adalah :

- Wisata budaya diarahkan di kawasan bangunan bersejarah yakni di daerah pusat Kota yang direncanakan pada PPK dengan luas 5,04 Ha.
- Wisata buatan diarahkan pada pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu dan Dermaga penyebrangan/*Water Front City* di Kelurahan Indra Sakti (Kecamatan Tanjungbalai Selatan) dan Pulau Simardan (Kecamatan Datuk Bandar Timur/SPPK 2).

#### **e. Kawasan Rawan Bencana**

Topografi Kota Tanjungbalai yang relatif datar dan berada hanya 0-3 meter di atas permukaan laut menyebabkan Kota Tanjungbalai rawan terhadap genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air sungai. Potensi banjir kiriman juga bisa saja terjadi karena posisi Kota Tanjungbalai yang berada di antara pertemuan 2 (dua) sungai besar yakni Sungai Silau dan Sungai Asahan.

Adapun daerah-daerah yang terkena dampak paling terdahulu umumnya adalah daerah yang berada di sekitar aliran sungai yaitu di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Gading (Kecamatan Datuk Bandar), Kelurahan Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi dan Kelurahan Pulau Simardan (Kecamatan Datuk Bandar Timur).

## f. Demografi

Penduduk sebagai faktor yang mendominasi pelaksanaan pembangunan yang berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran dari pembangunan perlu diketahui karakteristiknya yakni jumlah, distribusi, komposisi dan kualitasnya. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia berkualitas mutlak dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

### 1.3. Gambaran Umum Penduduk Kota Tanjungbalai

Jika dilihat dari sudut sex ratio, penduduk Kota Tanjungbalai setiap tahunnya selalu didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Keadaan ini terus berlanjut s/d tahun 2018 dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,61 % dan penduduk perempuan sebesar 49,38 %. Berikut data jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2018.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai Tahun 2018 (dalam jiwa)**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Lk + Pr
1.	Datuk Bandar	19.278	18.826	38.104
2.	Datuk Bandar Timur	15.301	14.864	30.165
3.	Tanjungbalai Selatan	10.353	10.672	21.025
4.	Tanjungbalai Utara	9.132	8.833	17.965
5.	Sei Tualang Raso	13.631	13.057	26.688
6.	Teluk Nibung	20.425	19.718	40.143
<b>Jumlah</b>		<b>88.120</b>	<b>85.970</b>	<b>174.090</b>

**Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai**

#### **Jumlah Penduduk Menurut Usia**

Penduduk Kota Tanjungbalai berdasarkan struktur usia dari Tahun 2018 umumnya masih didominasi penduduk usia 5 tahun sampai dengan 19 tahun. Keadaan penduduk di kelompok usia ini pada tahun 2018 mencapai 54.198 jiwa atau (31,13%). Penduduk terbanyak adalah di kelompok umur 10 - 14 tahun yaitu sebesar 18.427 jiwa. sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk dengan usia pensiun yakni penduduk kelompok usia 70-74 sebesar 1.968 jiwa. Keadaan penduduk berdasarkan struktur usia Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.5 dibawah ini :

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia**  
**Tahun 2018 (dalam jiwa)**

<b>Golongan Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Lk + Pr</b>
0-4 tahun	6.958	6.586	13.544
5-9 tahun	8.981	8.554	17.535
10-14 tahun	9.496	8.931	18.427
15-19 tahun	9.386	8.850	18.236
20-24 tahun	8.369	7.905	16.274
25-29 tahun	7.559	6.930	14.489
30-34 tahun	7.113	6.559	13.672
35-39 tahun	6.779	6.375	13.154
40-44 tahun	5.612	5.504	11.116
45-49 tahun	4.971	5.070	10.041
50-54 tahun	3.982	4.288	8.270
55-59 tahun	3.291	3.627	6.918
60-64 tahun	2.436	2.703	5.139
65-69 tahun	1.538	1.675	3.213
70-74 tahun	800	1,168	1.968
75 tahun keatas	849	1.245	2.094
<b>Jumlah</b>	<b>88.120</b>	<b>85.970</b>	<b>174.090</b>

**Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai**

#### **1.4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Pemerintah Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, terdiri dari :

1. Walikota dan Wakil Walikota
2. Sekretaris Daerah
3. 3 (tiga) orang Staf Ahli
4. 3 (tiga) orang Asisten , yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, Asisten Administrasi
5. 9 (sembilan ) Bagian, yaitu Bagian Pemerintahan dan otonomi daerah, Bagian Hukum dan Ham, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Umum, Bagian Protokol, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Barang dan Jasa.
6. 20 (dua puluh) dinas yaitu dinas pendidikan, dinas kesehatan,

dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, satuan polisi pamong praja, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas pangan dan pertanian, dinas lingkungan hidup, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pemberdayaan perempuan, perlingkungan anak dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, dinas perhubungan, dinas komunikasi dan informatika, dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas perikanan, dinas perdagangan dan perindustrian. )

- 7 Inspektorat
8. Sekretariat DPRD
9. 5 (lima) Badan Daerah kota yaitu Bappeda; BKD; Badan Kesbangpol; Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan aset daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. 6 (enam) Kecamatan yaitu, Kecamatan Datuk Bandar; Kecamatan Datuk Bandar Timur; Kecamatan Tanjungbalai Selatan; Kecamatan TB utara; Kecamatan Sei Tualang Raso; Kecamatan Teluk Nibung

## 1.5 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Tanjungbalai

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Tanjungbalai periode 2013 - 2017 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, yakni sebesar 5,94 persen; 5,78 persen; 5,57 persen; 5,76 persen dan 5,51 persen. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online.

turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan. Dari hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha/perusahaan di Tanjungbalai tercatat sebanyak 18.890 usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Ekonomi 2006 yang sebanyak 17.800 usaha/perusahaan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian daerah juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan cukup pesat. Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya adalah kategori usaha yang belakangan ini menjadi penguat keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai. Capaian pertumbuhan ekonomi kategori tersebut cukup tinggi dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi total yang mencapai 5,76 persen pada periode 2012-2016. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup menggembirakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai di tahun 2016 secara umum masih tetap lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.6**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2013-2017**

NO	KETERANGAN	2013	2014	2015	2016*)	2017
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	5,94	5,78	5,57	5,76	5,51
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	6,07	5,23	5,1	5,18	5,12
3.	Nasional (persen)	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07

Sumber :BPS Kota Tanjungbalai, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Pusat

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Pencapaian kinerja PDRB Kota Tanjungbalai selama tahun 2012-2016 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.2,39 trilyun dari Rp.4,33 trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp.6,72 trilyun pada tahun 2016 (angka sangat sementara).Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kota Tanjungbalai selama tahun 2012-2016. Tetapi hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terdapat inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.



Prospek perekonomian Kota Tanjungbalai pada tahun 2018 diperkirakan tetap optimis, walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat. Optimisme terhadap peningkatan ekonomi Kota Tanjungbalai seiring dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan diharapkan akan semakin membaik. Berdasarkan data capaian indikator makro ekonomi Kota Tanjungbalai dari tahun 2013-2016 dan estimasi tahun 2017, maka diproyeksikan sasaran makro ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 1.7**  
**Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2014-2017 dan Estimasi Tahun**  
**2018-2020 Kota Tanjungbalai**

No	INDIKATOR	SATUAN					Estimasi	PRAKIRAAN TARGET	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,78	5,57	5,76	5,51	5,85	5,95	6,05
2	PDRB ADHB	Miliar Rp	5.439,08	6.051,92	6.722,59	7.424,96	8.531,22	9.598,60	10.818,02
3	PDRB ADHK 2010	Miliar Rp	4.392,58	4.637,21	4.904,54	5.174,84	5.485,44	5.811,61	6.163,01
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	33,029	36,236	39,759	44,373	48,980	54,342	60,394
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	Juta Rp	26,674	27,766	29,006	30,229	31,493	32,902	34,406
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,02	15,08	14,49	14,46	11,74	11,16	10,48
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,05	10,06	NA	5,5	8,10	7,64	7,22

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2018-2020, RPJMD Kota Tanjungbalai 2016--2021

Catatan :\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan daerah, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 diproyeksikan dapat tumbuh pada kisaran sebesar 5,9-6,1persen. Dari aspek kemiskinan, diproyeksikan angka kemiskinan akan menurun, diperkirakan akan berada pada kisaran 14,26 persen pada tahun 2019. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15 tahun juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2019 TPT diproyeksikan berada pada kisaran 9,66 persen.

## **1.6 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

## **1.7 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2019 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Tanjungbalai sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- 1.7.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
  - 1.7.1.1.1 Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
  - 1.7.1.1.2 Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
  - 1.7.1.1.3 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
  - 1.7.1.1.4 Optimalisasi Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
  - 1.7.1.1.5 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - 1.7.1.1.6 Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- 1.7.1.2 Kebijakan Dana Perimbangan meliputi:
  - 1.7.1.2.1 Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21;
  - 1.7.1.2.2 Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan
  - 1.7.1.2.3 Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 1.7.1.3 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
  - 1.7.1.3.1 Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah “Aneka Usaha Kualo” yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah;
  - 1.7.1.3.2 Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
  - 1.7.1.3.3 Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
  - 1.7.1.3.4 Mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui penerapan PPK-BLUD pada Rumah Sakit Daerah T. Mansyur untuk peningkatan pendapatan daerah.

Adapun secara garis besar realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.8**  
**Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota**  
**Tanjungbalai Tahun 2017 s/d Tahun 2021**

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018(unaudited)	TAHUN BERJALAN 2019	PREDIKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA 2020	PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1	2	4	5	6	7	
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>61.110.551.271,52</b>	<b>69.060.641.086,00</b>	<b>91.602.141.086,00</b>	<b>95.517.719.598,00</b>	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.277.125.377,02	13.458.500.000,00	14.000.000.000,00	14.183.852.325,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.591.832.466,01	24.650.846.400,00	45.650.846.400,00	45.902.538.800,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.594.848.027,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.523.564.363,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.646.745.401,49	24.951.294.686,00	24.951.294.686,00	27.907.764.110,00	
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>511.282.786.918,00</b>	<b>530.190.296.000,00</b>	<b>575.157.355.000,00</b>	<b>548.087.904.705,00</b>	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.044.677.316,00	16.260.021.000,00	32.124.012.000,00	16.644.869.000,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	415.172.063.000,00	418.666.416.000,00	446.820.629.000,00	422.190.179.705,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	83.066.046.602,00	95.263.859.000,00	96.212.714.000,00	109.252.856.000,00	
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>28.522.113.142,00</b>	<b>26.522.113.142,00</b>	<b>42.547.056.849,00</b>	<b>24.172.389.372,00</b>	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.522.113.142,00	26.522.113.142,00	42.547.056.849,00	24.172.389.372,00	

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018(unaudited)	TAHUN BERJALAN 2019	PREDIKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA 2020	PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1	2	4	5	6	7	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6	Pendapatan Lainnya yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>600.915.451.331,52</b>	<b>625.773.050.228,00</b>	<b>709.306.552.935,00</b>	<b>667.778.013.675,00</b>	

Sumber: BPPKAD Kota Tanjungbalai (data diolah)

## 1.8 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, disisi lain peningkatan pendapatan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja daerah, mengakibatkan kemampuan riil keuangan daerah cenderung semakin menurun.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2019 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).
3. Mengalokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional
5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.

6. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pilkada Serentak (kegiatan pengamanan pemilihan Anggota Legislatif).
7. Mengakomodir program pembangunan yang dijarah melalui aspirasi masyarakat (Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan dalam aplikasi e-panning Kota Tanjungbalai)
8. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses minimal 30persen dari total usulan yang diterima.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2019 diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

### **1.9 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 adalah :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021;
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 tahun 2016. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Tanjungbalai Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021, Rencana Kinerja Tahun 2018, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Juga dalam menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2018 Pemerintah Kota Tanjungbalai menyesuaikan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 ( lima ) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Hal tersebut secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

## 2.2. Visi dan Misi Kota Tanjungbalai

### 2.2.1. Visi

Perumusan visi dan misi dalam RPJMD merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan melalui Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021. Aktualisasi visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terlebih dahulu melewati proses pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan-kebijakan nasional maupun regional yang harus dipedomani.

Visi adalah sebuah interpretising life yang bermakna bagaimana memprediksi masa depan sebagai hal yang krusial untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Visi yang tertuang di dalam RPJMD ini merupakan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang merupakan visi dan misi jangka menengah Kota Tanjungbalai yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah :

**"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis"**

Visi pembangunan Kota Tanjungbalai ini diharapkan akan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional, selaras dengan RPJM Nasional 2009-2014, RPJMD dan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025. Visi ini diharapkan dapat terukur keberhasilannya, berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam rangka menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai Kota dengan masyarakatnya yang religius, hidup dalam suasana

yang aman, memiliki pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan industri dalam rangka peningkatan pendapatan menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Beberapa pengertian yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah :

- 1) **Mewujudkan**; yaitu keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan menjadi benar-benar berwujud
- 2) **Kota Tanjungbalai**; yaitu meliputi wilayah seluas 60,52 km<sup>2</sup> di pesisir Timur pulau Sumatera beserta seluruh warganya.
- 3) **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional
- 4) **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku.
- 5) **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.
- 6) **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 7) **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada

### 2.2.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang jalan dan petunjuk secara garis besar langkah-langkah untuk mencapai visi. Misi juga dapat didefinisikan sebagai suatu komitmen terbaik *stakeholder* baik sebagai tujuan maupun pelaku pembangunan. Misi yang dirumuskan dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
- 2) Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.
- 3) Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
- 4) Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 5) Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 6) Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis

dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.

- 7) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga

### 2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebuah misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan penetapan tujuan sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami.

Selanjutnya sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sama halnya dengan tujuan beberapa sasaran dapat menjawab cara mencapai satu tujuan tertentu dan juga harus memperhatikan isu-isu strategis daerah.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021**

No	Tujuan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
2	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia
3	Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah
4	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK
5	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
6	Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik
7	Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya
8	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian

Kedelapan tujuan di atas merupakan kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2021. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai secara bertahap, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun Jangka Pembangunan Menengah.

Sasaran Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 – 2021 ialah :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021**

No	Sasaran Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
10	Meningkatnya ketersediaan penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum
12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat

Kedua belas sasaran di atas merupakan wujud dari apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai secara nyata melalui Visi dan Misi dan Tujuan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2021, yang akan dicapai secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai tahunan selama masa 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah.

Berikut disajikan tabel yang berisikan sasaran dari tiap-tiap tujuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.3**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Tanjungbalai**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan public yang prima	1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini BPK terhadap LKPD</li> <li>• Tingkat Akuntabilitas Kinerja</li> <li>• Persentase SKPD yang menerapkan SPIP</li> <li>• Nilai peringkat evaluasi LPPD</li> </ul>
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan pulik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SKM terhadap pelayanan pemerintah kota (%)</li> </ul>
2. Membina dan memajukan kehidupan umat bergama menuju masyarakat yang religious dan berakhlak mulia	2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religious dan berakhlak mulia	3. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparat dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya permasalahan sara</li> </ul>
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera	3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah	4. Meningkatnya produktivitas sector perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB ADHK (Rp.juta)</li> <li>• PDRB ADHB (Rp.juta)</li> </ul>
		5. Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pengangguran terbuka</li> <li>• Nilai investasi (Rp.000)</li> </ul>
		6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)</li> <li>• IPM</li> </ul>
4. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan	4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	7. Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APK (%)</li> <li>• PAUD</li> <li>• SD/MI</li> </ul>

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	berbasis IPTEK	pendidikan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>SMP/MTs</li> </ul>
			APM (%) <ul style="list-style-type: none"> <li>SD/MI</li> <li>SMP/MTs</li> </ul>
	5.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	8.Meningkatkan sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas	Angka putus sekolah <ul style="list-style-type: none"> <li>SD/MI</li> <li>SMP/MTs</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Usia harapan hidup</li> <li>Jumlah kematian ibu</li> <li>Jumlah kematian bayi</li> <li>Jumlah kematian balita</li> <li>Prevalensi penurunan kasus gizi buruk</li> </ul>
5.Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan	6.Mewujudkan kualitas penataan kawasan kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.	9. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur public	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Tanjungbalai bebas banjir</li> <li>Persentase penataan kawasan kumuh</li> <li>Persentase penduduk pengguna air bersih</li> </ul>
		10.Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang di sertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penanganan sampah di Kota Tanjungbalai</li> <li>Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan</li> <li>Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai</li> </ul>
5.Membina kehidupan social politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya	7.Mewujudkan harmonisasi kehidupan social politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya	11. Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesadaran politik masyarakat</li> <li>Jumlah demo yang berakhir ricuh</li> <li>Persentase penurunan angka kriminalitas</li> </ul>

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
7. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga	8. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian	12. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kemiskinan</li> </ul> <p style="text-align: right;">Angka</p>

## 2.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Kondisi yang ingin diwujudkan di Kota Tanjungbalai adalah: “Tanjungbalai Maju, Madani dan Memiliki Daya Saing”. Tanjungbalai yang maju itu akan ditandai dengan: menurunnya permasalahan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan tingkat pemerataannya, serta berfungsinya sistem dan kelembagaan politik, hukum dan kelembagaan kemasyarakatan. Tanjungbalai yang madani itu akan ditandai dengan terwujudnya tata kehidupan masyarakat madani (*civil society*), yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban dan sejahtera dalam arti luas. Sedangkan Tanjungbalai yang berdaya saing diartikan sebagai kondisi di mana seluruh para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tanjungbalai mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan yang membawa kepada peningkatan standar hidup, sesuai dengan potensi serta peluang dan tantangan yang nyata ada di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang di atas dan analisis pencapaian RPJMD, serta kajian permasalahan - isu strategis strategis di bagian sebelumnya, maka di bagian ini akan menjelaskan Strategi Umum dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai 2016-2021.

### 2.4.1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum.

Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan strategi untuk mencapai tujuan.

Strategi pembangunan adalah dasar dalam menjabarkan berbagai program prioritas melalui kebijakan umum guna mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel berorientasi terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Untuk mendapatkan strategi yang relevan dan sesuai dengan karakteristik lingkungan internal dan eksternal pemerintahan daerah Kota Tanjungbalai maka dilakukan analisis SWOT (*strenghts, weaknesses, opportunities, & threats*). Melalui berbagai alternatif yang muncul, ditetapkan strategi pembangunan dalam rangka menuntuk melaksanakan tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi pertama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai;
3. Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pembangunan

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi kedua adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan;

2. Memperkuat peran pemuka agama dan guru-guru agama/pengajian dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketiga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas produk sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian koperasi, UKM, UMKM serta sektor pariwisata;
2. Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dan daya saing ketenagakerjaan.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi keempat adalah sebagai berikut:

1. Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring (dalam jaringan);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan;
5. Meningkatkan kualitas cakupan layanan kesehatan;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi kelima adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan
2. Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi keenam adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
3. Pengembangan seni dan budaya lokal.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketujuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan kesejahteraan keluarga.

Keterkaitan fokus pembangunan dan arah kebijakan berdasarkan pilihan strategi disajikan pada tabel berikut:

No	Fokus Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Fokus tata kelola pemerintahan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai	√	√	√	√	√
		Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	√	√	√	√	√
		Mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pemba-ngunan	√	√	√	√	√
		Mengembangkan kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan.	√	√	√	√	√
		Menguatkan peran pemuka agama dan guru-guru pengajian dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini.	√	√	√	√	√
2.	Fokus daya saing perekonomian dan kota simpul jasa	Meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan bantuan permodalan di sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM serta pariwisata.	√	√	√	√	√
		Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro.	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dan daya saing ketenagakerjaan.	√	√	√	√	√
3.	Fokus kemandirian masyarakat	Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring	√	√	√	√	√

		(dalam jaringan)					
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	√	√	√	√	√
		Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan.	√	√	√		
		Meningkatkan kualitas cakupan layanan kesehatan	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan.	√	√	√	√	√
		Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat.	√	√	√	√	√
		Peningkatan keamanan dan ketertiban umum.	√	√	√	√	√
		Pengembangan seni dan budaya lokal.	√	√	√	√	√
		Peningkatan keberdayaan masyarakat.		√	√	√	√
		Peningkatan kesejahteraan keluarga.			√	√	√
4.	Fokus sarana dan prasarana perkotaan	Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan.	√	√	√	√	√
		Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup serta pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.	√	√	√	√	√

#### 2.4.2 Arah kebijakan pembangunan tahun 2018

Penetapan arah kebijakan tahun ketiga dilaksanakan telah memperhatikan kesinambungan pelaksanaan program dan telah dapat dilihat upaya pencapaian yang diraih dari apa yang telah dilaksanakan pada tahun pertama dan tahun kedua. Penekanan pada perbaikan dan penyempurnaan cakupan pelayanan di berbagai bidang terus dilakukan dan diupayakan telah saling bersinergi dan melembaga antara SKPD dan stakeholder terkait. Perwujudan pelaksanaan program di berbagai bidang pembangunan telah dapat membuahkan hasil yang nyata

terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang dibuktikan dengan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang semakin membaik. Di tahun ini masyarakat Kota Tanjungbalai diharapkan telah dapat merasakan dan mengapresiasi pengembangan sektor pariwisata yang diiringi dengan pengembangan seni dan budaya lokal dengan masyarakat yang religi.

Berikut ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai yang akan dicapai pada tahun 2018 dengan jumlah **Anggaran APBD pada tahun 2018 sebesar Rp 671.336.560.937,00**

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
		Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Baik (B)
		Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	85%
		Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	6
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota (%)	60%
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	Berkurangnya permasalahan Sara	0
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	PDRB ADHK (Rp.juta)	5.485.438.30
		PDRB ADHB (Rp.juta)	8.531.220.04
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	Tingkat pengangguran terbuka	8,10 %
		Nilai investasi (Rp.000)	19.835.113
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	5,85 %
		PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)	31.493.52
		IPM	68,65

7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	APK (%)	
		PAUD	9,00 %
		SD/MI	100,75 %
		SMP/MTs	99,5 %
		APM (%)	
		SD/MI	91,28 %
		SMP/MTs	83,33 %
		Angka putus sekolah	
		SD/MI	0,18%
		SMP/MTs	0,20%
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	Usia Harapan Hidup	72%
		Persentase penurunan jumlah kematian Ibu (%)	2%
		Persentase penurunan jumlah kematian bayi (%)	6%
		Penurunan jumlah kematian balita (%)	6%
		Prevalensi Penurunan kasus gizi buruk	0,03%
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Kota Tanjungbalai bebas banjir	75 %
		Persentase penataan kawasan kumuh	60 %
		Persentase penduduk pengguna air bersih	77,77%
10	Meningkatnya penataan kawasan kota yang yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai	86 %
		Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	0,329 %
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai	Kategori sangat kurang (indeks 57,0)
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	70 %
		Jumlah demo yang berakhir ricuh	0
		Persentase penurunan Angka kriminalitas	20%
12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.	Penurunan Angka kemiskinan	11,74 %



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### 1. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2018. Perjanjian kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

## 2. Pengumpulan Data Kinerja.

Pengumpulan data kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

## 3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2018 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat beberapa perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan organisasi belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan realisasinya. Adapun perbandingan Tingkat Capaian *Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2017 dan 2018 dapat dibandingkan, dimana pada tahun 2017 sasaran strategis perjanjian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah selaras dengan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan*

untuk tahun 2018 sudah lebih baik dimana sasaran strategis sampai indikator kinerja perjanjian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai. Hal ini ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Perjanjian Kinerja 2017 dan Perjanjian Kinerja 2018**

No	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA 2017	CAPAIAN KINERJA 2018
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	57,5%	51,54%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	71,42%	137,55%
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	100%	100%
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	100%	90,68
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	345,38%	127%
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	100%	96,11%
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas.	109%	92,41%
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	76,19%	87,47%
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	100,47%	104,97%
10	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	148%	173%
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.	58,30%	61,45%
12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.	162%	80,19%
	<b>Jumlah rata-rata</b>	<b>119,02%</b>	<b>100,19%</b>

Capaian kinerja yang diperoleh Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tahun 2017 adalah 119,02 %, sedangkan capaian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar 100,19 %. dilihat dari capaian kinerja tersebut dikategorikan **BERHASIL** dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Untuk itu Pemerintah Kota Tanjungbalai akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang telah dicapai semakin ditingkatkan di masa mendatang.

Secara rinci, analisis atas masing – masing capaian indikator kinerja sasaran strategis ini akan diuraikan pada sub bab berikutnya yaitu Analisis Capaian Kinerja.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja sasaran. Program dan kegiatan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Analisis terhadap capaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran ini merupakan hasil dari beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan suatu program/kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output*, dan indikator kinerja *outcome*. Sedangkan capaian kinerja program umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome* dan ukuran pada tingkat *outcome* telah dilakukan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 :****MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan didukung oleh empat indikator kinerja yaitu opini BPK terhadap LKPD, Tingkat akuntabilitas kinerja, Persentase SKPD yang menerapkan SPIP, Nilai peringkat evaluasi LPPD.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Opini BPK terhadap LKPD	Persen	WTP	WDP	75%
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B / (62,5)	B / (61,26)	100 %
3	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	Persen	85	26,5	31,17%
4	Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	Nilai	6	24	0%-
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>51,54%</b>

*Sumber : (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Organisasi & Tatalaksana, Bagian pemerintahan).*

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Dari 4 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, tingkat capaian indikator yang telah memenuhi target tahun 2018 sebanyak 1 indikator kinerja yaitu tingkat akuntabilitas kinerja, 3 indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya Yaitu :

- Persentase SKPD yang menerapkan SPIP. pada tahun 2018 SPIP telah dilaksanakan oleh perangkat daerah didalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Implementasi SPIP harus ditunjang dengan prosedur pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku dan semakin tingginya integritas aparatur pemerintah. Kriteria dari perangkat yang telah menerapkan SPIP level 2, diukur dari persentase perangkat daerah yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), dari 34 OPD yang telah membuat SOP sebanyak 9 OPD (26,5%) pencapaian sasaran ini mengalami

hambatan karena kualifikasi SDM yang kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern.

- Opini BPK terhadap LKPD tidak mencapai target disebabkan oleh :

1. sistem pengendalian intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya :

- a. pencatatan pendapatan, penggunaan, sisa dana, dan penganggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak tertib;
- b. Validasi piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB P2) belum selesai dilaksanakan;
- c. Pengelolaan aset tetap dan aset lainnya tidak memadai.

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya;

- a. Pembayaran biaya penginapan dan uang harian dalam pelaksanaan perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.647.432,000
- b. Kekurangan volume sebesar Rp.1.704.715.809.05 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp.314.594.563 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

BPK mengharapkan Pemerintah Kota Tanjungbalai menindaklanjuti anatara lain :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) :

- a. Lebih cermat dalam melakukan rekonsiliasi dengan pengelola dana BOS, dalam melaporkan pendapatan, beban LO, sisa dana BOS pada neraca, serta pengakuan aset tetap yang diperoleh dari dana BOS;
- b. Lebih optimal dalam penegndalian atas pengelolaan piutang PBB P2, khususnya untuk menjamin validasi dan keandalan data piutang PBB P2;

- c. Lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan PBB P2;
- d. Menginstruksikan kepala bidang (kabid) pendapatan;
  - 1. Lebih cermat dalam menyajikan saldo piutang denda keterlambatan pelunasan PBB P2;
  - 2. Lebih optimal dalam menuntaskan kegiatan validasi PBB P2 serta menyesuaikan basis data aplikasi dan akun piutang pajak sesuai hasil validasi;
- e. Menginstruksikan Kabid Aset lebih cermat dalam menyusun, menyajikan, mengungkapkan saldo aset tetap dan aset lain-lain;

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik); mengusulkan anggaran pendapatan dan penggunaan dana BOS sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) secara rinci perbelanja satuan pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- Nilai Peringkat Evaluasi LPPD tidak mencapai target disebabkan oleh ;
  - a. Penetapan APBD tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
  - b. Penyampaian laporan keuangan tidak sesuai dengan jadwal.
  - c. Capaian indikator kinerja kunci masih rendah.
  - d. Hasil temuan masih layak belum ditindaklanjuti

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran di atas berada dalam capaian rata – rata sebesar 51,54 %.

### **Sasaran Strategis 2 :**

## **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik didukung oleh satu indikator kinerja yaitu :nilai SKM terhadap pelayanan pemerintah.

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota (%)	Persen	60	82,53	137,55%
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>137,55%</b>

*Sumber : (Bagian Organisasi & Tatalaksana).*

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahun 2018. Pemerintah Kota Tanjungbalai akan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan dimasa datang.

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran di atas berada dalam capaian rata – rata sebesar 137,55% .

### **Sasaran Strategis 3 :**

#### **MENINGKATNYA KEIMANAN DAN KETAQWAAN APARATUR DAN MASYARAKAT**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat didukung oleh satu indikator kinerja yaitu berkurangnya permasalahan sara.

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Kinerja Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Berkurangnya permasalahan sara	Persen	0	0	100
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>100%</b>

*Sumber : (Badan Kesatuan Bangsa & Politik)*

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahun 2018. Untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Nilai Luhur Badan Kesbangpol Telah Menyelenggarakan kegiatan dan lomba lomba yang diikuti oleh 300 peserta, serta juga pada tahun 2018 telah dilaksanakan pelantikan kepengurusan dari forum FKUB dan FPK dengan harapan dapat menghimpun keberadaan dari seluruh elemen masyarakat dan menghindari adanya permasalahan sara di Kota Tanjungbalai.

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran diatas berada dalam capaian rata - rata sebesar 100%.

#### **Sasaran Strategis 4 :**

### **MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah didukung oleh dua indikator kinerja yaitu PDRB ADHK, PDRB ADHB.

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Kinerja Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	PDRB ADHK (Rp.juta)	juta	5.485.438.30	5.174.845.42	94,33%
2	PDRB ADHB (Rp.juta)	juta	8.531.220,04	7.424.964,63	87,03%
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>90,68%</b>

*Sumber : (Badan Pusat Statistik)*

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Data dari BPS Kota Tanjungbalai perkembangan pendapatan perkapita Kota Tanjungbalai tampak terus mengalami peningkatan namun demikian PDRB perkapita Kota Tanjungbalai relatif masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional maupun Sumatera Utara. Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan penguatan sendi perekonomian Daerah pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan cukup pesat antara lain kontruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, penyedia akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya.

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran diatas berada dalam capaian rata - rata sebesar 90.68%.

### **Sasaran Strategis 5 :**

## **MENINGKATNYA DAYA SAING PELAKU USAHA DAN KETENAGAKERJAAN YANG MENDUKUNG DAYA SAING DAERAH**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah didukung oleh dua indikator kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka, nilai investasi.

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Kinerja Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,10	5,5	147%
2	Nilai investasi (Rp.000)	Rupiah	19.835.113	21.310.000	107,43%
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>127%</b>

*Sumber : (Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu)*

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, seluruhnya telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahun 2018 dan tidak ada indikator kinerja

yang belum mencapai target. Pemerintah Kota Tanjungbalai akan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan dimasa datang.

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran diatas berada dalam capaian rata - rata sebesar 127% .

### **Sasaran Strategis 6 :**

## **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB/Kapita ADHK, IPM.

**Tabel 3.7**  
**Pencapaian Kinerja Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,85	5,51	94,18%
2	PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)	Rupiah	31.493,52	30.229,196	95,98%
3	IPM	Persen	68,65	67,41	98,19%
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>96,11%</b>

*Sumber : (Badan Pusat Statistik)*

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, seluruhnya telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahun 2018 dan tidak ada indikator kinerja yang belum mencapai target. Pemerintah Kota Tanjungbalai akan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan dimasa

datang. Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran di atas berada dalam capaian rata – rata sebesar 96,11%.

### **Sasaran Strategis 7 :**

## **MENINGKATNYA SISTEM DAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN SERTA SUMBERDAYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka putus sekolah.

**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Kinerja Terciptanya Produktifitas Pada Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)				
	PAUD	Persen	9,00	15,68	174,22%
	SD/MI	Persen	100,75	106,49	105,70
	SMP/MTs	Persen	99,5	102,62	103,13%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)				
	SD/MI	Persen	91,28	98,43	107,83%
	SMP/MTs	Persen	83,33	66,47	79,77%
3	Angka putus sekolah				
	SD/MI	Persen	0,18	0,29	62,06%
	SMP/MTs	Persen	0,20	1,41	14,18%
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>92,41%</b>

Sumber : (Dinas Pendidikan)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Dari 7 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, seluruhnya telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahun 2018 indikator kinerja angka putus sekolah yang tidak mencapai target disebabkan faktor ekonomi keluarga dan kurangnya pemahaman dan kem,auan orangtua untuk mendorong anak-anak mereka bersekolah.

Solusi meningkatkan pendapatan tiap keluarga agar para orang tua tersebut punya waktu untuk duduk berbincang dengan anak-anaknya.

Mengadakan penyuluhan arti pentingnya keluarga dan juga pendidikan

Penguatan pendidikan keluarga dilingkungna masyarakat tanjungbalai

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisir dalam mendukung sasaran di atas berada dalam capaian rata – rata sebesar 92,41%.

### **Sasaran Strategis 8 :**

#### **MENINGKATNYA SISTEM DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN SERTA SUMBERDAYA KESEHATAN YANG BERKUALITAS**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatkan sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas didukung oleh lima indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup, Persentase penurunan jumlah kematian Ibu, Persentase penurunan jumlah kematian bayi, Penurunan Jumlah kematian balita (%), Prevalensi Penurunan kasus gizi buruk.

**Tabel 3.9**  
**Pencapaian Kinerja Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Usia Harapan Hidup	Persen	72	60	83,3%
2	Persentase penurunan jumlah kematian Ibu (%)	Persen	2	1,3	153,85%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
3	Persentase penurunan jumlah kematian bayi (%)	Persen	6	9,13	65,72%
4	Penurunan Jumlah kematian balita (%)	Persen	6	17,48	34,32%
5	Prevalensi Penurunan kasus gizi buruk	Persen	0,03%	0,03	100%
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>87,438%</b>

Sumber : (Dinas Kesehatan).

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, ada 3 indikator yang tidak mencapai target yaitu usia harapan hidup, Persentase penurunan jumlah kematian bayi, Penurunan jumlah kematian balita.

Angka Kematian Bayi didapat dari jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur satu tahun per 1000 Kelahiran Hidup. Untuk Kota Tanjungbalai hanya dapat dihitung jumlah kematian bayi.

Pada tahun 2010 terdapat 11 bayi meninggal dibawah satu tahun dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan yang signifikan menjadi 114 kematian bayi. Pada tahun 2011 diperoleh jumlah kematian bayi tinggi dikarenakan dilakukan kegiatan autopsi verbal kematian bayi, sehingga diperoleh data jumlah bayi yang meninggal disertai penyebab kematiannya masing-masing sehingga pencatatan kematian bayi lebih akurat. Angka kematian bayi yang tinggi juga disebabkan bayi yang meninggal tidak dipilah berdasarkan alamat, seluruh kematian yang terjadi di Rumah Sakit Umum Kota Tanjungbalai dicatat sehingga angkanya sangat tinggi. Untuk tahun 2012 terdapat 25 bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun. Autopsi verbal yang dilakukan pada tahun 2012 hanya mencatat kematian bayi yang terjadi di Rumah Sakit Umum yang berasal dari Kota Tanjungbalai. Tahun 2013 terjadi 35 kasus kematian bayi dan 49 kasus kematian neonatal. Pada tahun 2014 jumlah kematian bayi sebanyak 77 kasus dan pada tahun 2015 menurun cukup signifikan menjadi hanya sebesar 36 kasus. Pada tahun 2016 jumlah kematian bayi sebanyak 26 kasus. Jika dilihat sejak tahun 2014 hingga 2016 terjadi penurunan

jumlah kasus kematian bayi, hal ini menunjukkan program kesehatan ibu anak yang dilaksanakan telah berhasil menekan jumlah kematian bayi di Kota Tanjungbalai.

Angka Kematian Balita didapat dari jumlah kematian yang terjadi pada anak di usia 12-59 bulan. Pada tahun 2010 jumlah balita adalah 17.353 dan jumlah balita yang meninggal sebanyak 31 orang. Dari 17.641 jumlah sasaran balita pada tahun 2011, jumlah balita yang meninggal adalah 121 balita. Sedangkan dengan jumlah sasaran balita yang sama pada tahun 2012 terdapat 14 orang balita yang meninggal sebelum usia 59 bulan. Kondisi pencatatan data kematian balita sama dengan pencatatan kematian bayi dimana pada tahun 2011 dilakukan autopsy verbal kematian balita tanpa memandang alamat balita sehingga data yang diperoleh sangat tinggi dan pada tahun 2012 sudah berdasarkan alamat balita yang meninggal. Jumlah kematian anak balita meningkat pada tahun 2013 menjadi sebanyak 17 kasus dan kematian balita sebesar 52 kasus kematian. Pada tahun 2014 jumlah kematian anak balita menurun menjadi hanya 6 kasus namun terjadi kenaikan jumlah kematian balita menjadi 83 kasus. Pada tahun 2015 jumlah kematian anak balita meningkat menjadi hanya 15 kasus namun terjadi penurunan jumlah kematian balita menjadi hanya 53 kasus. Sampai tahun 2016 masih terjadi penurunan jumlah kematian anak balita sehingga hanya 7 kasus dan untuk balita hanya 36 kasus. Hal ini juga menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan balita yang dilaksanakan selama ini telah berhasil menurunkan jumlah kematian balita di Kota Tanjungbalai.

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu didapat dari jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Tanjungbalai tahun 2010 jumlah kematian ibu yaitu 9 orang. Pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 13 orang yang terdiri dari 3 kasus kematian pada ibu hamil berusia  $\geq 35$  tahun, 3 kasus kematian pada ibu bersalin yang juga berusia  $\geq 35$  tahun dan 1 kasus terjadi pada ibu nifas (2 kasus yang berusia 20-34 tahun dan 1 kasus yang berusia

≥35 tahun). Pada tahun 2012 jumlah ibu yang meninggal menurun menjadi hanya 6 orang, 4 orang meninggal pada saat hamil dan 2 orang meninggal pada saat bersalin. Pada tahun 2013 jumlah kematian ibu meningkat kembali menjadi 10 kasus, dimana 3 kasus kematian terjadi pada ibu hamil, 6 kasus kematian ibu bersalin dan 1 kasus kematian pada ibu nifas. Terjadi penurunan jumlah kematian ibu pada tahun 2014 menjadi hanya 4 kasus yaitu 2 kasus pada ibu bersalin dan 2 kasus kematian ibu pada masa nifas. Pada tahun 2015 jumlah kematian ibu sama dengan tahun 2014 yaitu 4 kasus dengan persebaran 1 kasus kematian ibu hamil dan 3 kasus kematian pada ibu nifas.

Pada tahun 2016 jumlah kematian ibu meningkat menjadi 5 kasus yang terdiri dari kematian ibu hamil 1 kasus dan kematian ibu bersalin sebanyak 4 kasus. Hal ini masih perlu untuk mendapat perhatian pihak-pihak yang terkait, mengingat kematian ibu termasuk salah satu barometer bagi keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu daerah.

Pada tahun 2017 jumlah penderita gizi kurang sebanyak 86 orang dan gizi buruk sebanyak 43 orang dilakukan pembandingan dengan data sasaran jumlah seluruh balita disuatu wilayah sebanyak 15.500 balita, maka prevalensi gizi buruk sebanyak 0,02 %. Bila dibandingkan pada 2016 penderita gizi buruk bertambah sebanyak 16 orang.

Pada tahun 2018 jumlah penderita gizi kurang sebanyak 75 orang dan gizi buruk sebanyak 55 orang dan dilakukan pembandingan dengan data sasaran jumlah seluruh balita disuatu wilayah sebanyak 19.041 balita, maka prevalensi gizi buruk sebanyak 0,03%. Bila dibandingkan pada tahun 2017 penderita gizi kurang sebanyak 11 orang, sedangkan untuk gizi buruk bertambah sebanyak 12 orang.

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran ini terutama pencapaian indikator menurunkan jumlah kematian ibu, bayi dan balita ditetapkan program utama yakni Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Revitalisasi Sistem Kesehatan

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya mewujudkan Puskesmas terakreditasi. Kegiatan ini untuk mendukung

pencapaian tujuan dalam Renstra Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2019 setiap Kecamatan harus memiliki Puskesmas terakreditasi.

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan ini berisi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan zat aditif, kegiatan penjangkaran kesehatan siswa SD dan kegiatan pemeriksaan dan penyuluhan kepada kelompok pekerja sektor informal.

3. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Kegiatan ini terdiri dari Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang ASI Eksklusif bagi Bidan, kegiatan Kelas Ibu dan Balita, kegiatan PKPR, kegiatan Refresh Buku KIA dan kegiatan Pencatatan dan Pelaporan KB.

4. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Kegiatan ini adalah transport bagi kader Posyandu balita dan kader Posyandu lansia sebanyak 118 Posyandu untuk 12 bulan. Kegiatan pemberian transport para kader Posyandu ini diharapkan dapat meringankan biaya transportasi para kader ke Posyandu dan sebagai pemberi semangat agar para kader lebih semangat dalam memberi pelayanan di Posyandu sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan bayi dan balita ke Posyandu. Hasil yang diharapkan jumlah kunjungan bayi balita ke Posyandu akan meningkat 30%.

5. Jaminan Persalinan

Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi karena terdiri dari biaya persalinan bagi ibu yang tidak tercover BPJS, transport ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan, operasional rumah tunggu kelahiran beserta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Namun pada tahun 2016 kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan di Kota Tanjungbalai tidak terdapat rumah tunggu kelahiran sehingga dananya tidak bisa digunakan (menurut Juknis Pemanfaatan dana Jampersal daerah harus memiliki rumah tunggu kelahiran baru bisa ditarik dananya)

6. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal

Kegiatan ini berisi klaim pembayaran biaya persalinan ibu-ibu peserta BPJS Kesehatan kepada Bidan yang memiliki Mou dengan BPJS Kesehatan.

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran di atas berada dalam capaian rata – rata sebesar 87,438%.

### **Sasaran Strategis 9 :**

## **MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Kota Tanjungbalai bebas banjir, Persentase penataan kawasan kumuh, Persentase penduduk pengguna air bersih.

**Tabel 3.10**  
**Pencapaian Kinerja Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Kota Tanjungbalai bebas banjir	Persen	75	89,76	119,68%
2	Persentase penataan kawasan kumuh	Persen	60	40	66,66%
3	Persentase penduduk pengguna air bersih	Persen	77,77	100	128,58%
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>104,97%</b>

Sumber : (Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman)

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, seluruhnya telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahun 2018. Pemerintah Kota Tanjungbalai akan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan dimasa datang.

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran di atas berada dalam capaian rata – rata sebesar 104,97 %.

**Sasaran Strategis 10 :****MENINGKATNYA PENATAAN KAWASAN KOTA YANG BERSIH,INDAH DAN RAPI YANG DISERTAI DENGAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai , Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan, Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai.

**Tabel 3.11****Pencapaian Kinerja Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai	persen	86	86	100%
2	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	persen	0,329%	1,05	319%
3	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai	Persen	Kategori sangat kurang (indeks 57,0)	Kategori sangat kurang (indeks 57,0)	100%
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>173%</b>

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang)

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, seluruhnya telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahun 2018 dan tidak ada indikator kinerja yang belum mencapai target. Pemerintah Kota Tanjungbalai akan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi

agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan dimasa datang.

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran diatas berada dalam capaian rata - rata sebesar 173 %.

### **Sasaran Strategis 11 :**

#### **TERCIPTANYA KERUKUNAN DAN HARMONISASI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA MENDORONG DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT YANG BERBUDAYA BERLANDASKAN HUKUM**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Peningkatan kesadaran politik masyarakat, Jumlah demo yang berakhir ricuh, Persentase penurunan angka kriminalitas.

**Tabel 3.12**  
**Pencapaian Kinerja Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	Persen	70%	59,05	84,35%
2	Jumlah demo yang berakhir ricuh	Kali	0	0	100%
3	Persentase penurunan angka kriminalitas	persen	20	0	0%
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>61,45%</b>

Sumber : (Badan Kesatuan Bangsa & Politik)

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, tingkat capaian indikator yang telah memenuhi target tahun 2018 sebanyak 2 indikator kinerja, 1 indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikarenakan Belum optimalnya

penurunan gangguan keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat disebabkan oleh beberapa factor. Dalam hal ini salah satunya adalah situasi ekonomi nasional cenderung membaik, namun kondisi ekonomi di Kota Tanjungbalai masih stagnan, sehingga mengakibatkan meningkatnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan dan masih kurang berjalannya investasi di daerah. Kota Tanjungbalai juga merupakan Wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga belum bisa terpantau seluruhnya oleh aparat keamanan. Hal tersebut berdampak pada terjadinya kasus-kasus pelanggaran. Konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi antar individu, antar kelompok, antar ras, dan antar budaya. Konflik sosial merupakan fenomena sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, Perubahan sosial akibat modernisasi sering kali diikuti oleh timbulnya konflik sosial. Konflik sosial menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi kacau, Oleh karena itu, konflik sosial harus segera diatasi agar tidak meluas dan mengancam disintegrasi sosial. Diharapkan dengan adanya peningkatan kewaspadaan dini dan juga adanya sosialisasi wawasan kebangsaan ke depannya dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga menghindari adanya Konflik / kerawanan sosial seperti kasus penembakan terduga teroris sebelum sempat melaksanakan aksinya yang meresahkan masyarakat dan pencegahan unjuk rasa berakhir ricuh di masyarakat, untuk angka unjuk rasa sendiri di kota tanjungbalai pada tahun 2018 terjadi peningkatan tetapi masih dapat dijaga agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum dalam upaya masyarakat menyampaikan aspirasi nya melalui aksi aksi unjuk rasa tersebut.

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran di atas berada dalam capaian rata - rata sebesar 61,45%.

**Sasaran Strategis 12 :****MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL  
MASYARAKAT**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Penurunan Angka kemiskinan.

**Tabel 3.13****Pencapaian Kinerja Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Penurunan Angka kemiskinan	Persen	11,74	14,64	80,19%
<b>Jumlah rata-rata</b>					<b>80,19%</b>

*Sumber : (BPS Kota Tanjungbalai)*

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Berdasarkan hasil susenas, di tahun 2018 penduduk miskin di Kota Tanjungbalai semakin bertambah, hal ini ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin yang mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit selisihnya jika dibandingkan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kota Tanjungbalai sebesar 14,46 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 24.690 jiwa, di tahun 2018 naik menjadi 14,64 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25.300 jiwa.

Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menysasar masyarakat berpenghasilan rendah, yakni masyarakat miskin dan rentan miskin dan rentan miskin diantaranya melalui program beras sejahtera (Rastra), Raskin Madani, Program Keluarga Harapan, Pemberian modal bagi kelompok usaha bersama.

### 3.3 INFORMASI KEUANGAN TAHUN 2018

Informasi keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

#### REALISASI APBD TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

Uraian	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)
1	2	3	
<b>PENDAPATAN</b>	671.336.560.937,00	621.106.490.777,80	92.51
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	92.624.151.795,00	69.683.146.638,80	75.23
Pendapatan Pajak Daerah	13.458.500.000,00	16.012.087.186,00	118.97
Pendapatan Retribusi Daerah	27.898.466.400,00	20.174.105.009,44	72.31
Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.000.000.000,00	3.300.000.000,00	55%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.267.185.395,00	30.196.954.443,36	66.70
Dana Perimbangan	530.190.296.000,00	524.827.102.453,00	98,98
Bagi hasil pajak	12.889.830.000,00	9.794.139.468,00	75,98
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.370.191.000,00	5,521.940.815,00	163,8
Dana alokasi umum	418.666.416.000,00	418.666.416.000,00	100
Dana alokasi khusus Fisik	49.506.000.000,00	46.995.399.491,00	94,93
Dana alokasi khusus non fisik	45.757.859.000,00	43.849.206.679,00	95,83
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.522.113.142,00	18.747.759.286,00	70.68
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.000.000.000,00	7.848.482.400,00	35,67
<b>BELANJA</b>	877,036,560,937,00	657,653,948,494,00	74,98
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	541.768.181.392,00	341.583.749.485,00	63.05
<b>Belanja Pegawai</b>	33.563.901.438,00	32.238.542.542,00	96,05
Belanja Barang dan Jasa	223.394.804.915,00	188.379.505.073,00	84.33
<b>Belanja Modal</b>	384.809.475.039,00	120.965.701.870,00	42.47
SURPLUS / DEFISIT	(205,700,000,000,00)	36.547,457,716,,20	17.76
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	210.000.000.000,00	139.491.665,98	0,06
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	79.000.000.000,00	84.302.082,,65	0,10
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1,000,000,000,00	55,189,583,33	5,51
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	4,300,000,000,00	3,300,000,000,00	76,74
<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	3,300,000,000,00	3,300,000,000,00	100
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3,300,000,000,00	3,300,000,000,00	100
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	205,700,000,000,00	3,160,508,334,02	-1,53
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	39.707.966.,050.22	0.00

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2018 Rp. 621.106.490.777,80 atau 92,51 % kurang sebesar Rp.50.230.070.159,20 atau 8,09 % dari target pendapatan sebesar Rp.671.336.560.937,00. Kurang terealisasinya target pendapatan daerah tersebut disebabkan karena Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tidak memenuhi target yang diinginkan.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.341.583.749.485,00 atau 63,05% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 541.768.181.392,00 dan realisasi Belanja modal sebesar Rp.120.965.701.870,00 atau 42,47 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.284.809.475.039,00 sehingga secara keseluruhan total realisasi Belanja Pemerintah Kota Tanjungbalai Rp.657.653.948.494,00 atau hanya sebesar 74,98 %. Realisasi belanja tersebut kurang sebesar -33,35 % atau Rp.219.382.612.443,00 dari total yang dianggarkan sebesar Rp.877.036.560.937,00

**BAB IV    PENUTUP**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jawaban dari Visi, Misi dan Tujuan Strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 ini , dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Tanjungbalai telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 35 ( tiga puluh lima) indikator dari 12 (dua belas) Sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis dengan sasaran dengan nilai >100 sebanyak 4 sasaran (135,63%), sasaran dengan nilai >95-100 sebanyak 2 sasaran (98,655%), sasaran dengan nilai >85-95 sebanyak 3 sasaran (90,185%), sasaran dengan nilai >75-85 sebanyak 1 sasaran (80,19 %), sasaran dengan nilai >50-65 sebanyak 2 sasaran (56,495%). Secara keseluruhan capaian kinerja Kota Tanjungbalai dapat disimpulkan telah mencapai nilai rata-rata sebesar **100,19 % atau BERHASIL** , dan secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran 1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan 4 (empat) indikator sebesar 51,54 % atau BELUM BERHASIL.
2. Pencapaian sasaran 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan 1 (satu) indikator sebesar 137,55 % atau BERHASIL.
3. Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat dengan 1 (satu) indikator sebesar 100 % atau BERHASIL.
4. Pencapaian sasaran 4 Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah dengan 2 (dua) indikator sebesar 90,68 % atau BERHASIL.
5. Pencapaian sasaran 5 Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah dengan 2 (dua) indikator sebesar 127 % atau BERHASIL.
6. Pencapaian sasaran 6 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3(tiga) indikator sebesar 96,11 % atau BERHASIL.
7. Pencapaian sasaran 7 Meningkatnya nsistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas dengan 7 (tujuh) indikator sebesar 92,41% atau BERHASIL.
8. Pencapaian sasaran 8 Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas dengan 5 (lima) indikator sebesar 87,438% atau BERHASIL.
9. Pencapaian sasaran 9 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik dengan 3 (tiga) indikator sebesar 104,97 % atau BERHASIL.
10. Pencapaian sasaran 10 Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim dengan 3 (tiga) indikator sebesar 173% atau BERHASIL.
11. Pencapaian sasaran 11 Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum dengan 3 (tiga) indikator sebesar 61,45 % atau TIDAK BERHASIL.

12. Pencapaian sasaran 12 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat dengan 1 (satu) indikator sebesar 80,19 % atau BERHASIL.

Anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 671.336.560.937,00 (*Enam ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dengan realisasi 621.106.490.777,80 atau 92,51 % (*enam ratus dua puluh satu milyar seratus enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh, delapan puluh sen rupiah*).

Pencapaian target indikator yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021, khususnya untuk tahun anggaran 2018 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dikategorikan **BERHASIL**. Terhadap indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras demi terwujudnya masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan sejahtera.

Pada tahun 2016 ini Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun rancangan awal RPJMD yang di kerjasamakan dengan pihak Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksud Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah:

**"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis"**.

Dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat

membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

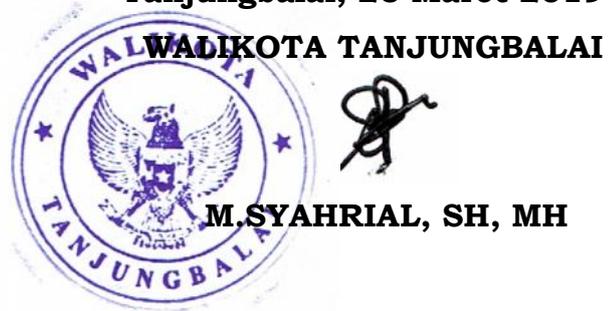
- 2) **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku..
- 3) **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.
- 4) **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.
- 5) **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada.

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan seta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik.
6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.
7. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga.

**Tanjungbalai, 26 Maret 2019**





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Gaharu No. 12 Telp (0623)94320 FAXIMILI 94330  
TANJUNGBALAI

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Tanjungbalai, 25 Maret 2019

INSPEKTUR DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI



SUSANTO, SE  
NIP. 19660308 198712 1 003

**LAPORAN HASIL REVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN 2018**

**NOMOR : 700/09/LHP/R/RHS /2019**

**TANGGAL : 25 Maret 2019**

<b>Daftar Isi</b>	<b>Halaman</b>
I. Ringkasan Eksekutif .....	2
II. Dasar Hukum .....	3
III. Tujuan Reviu .....	4
IV. Ruang Lingkup Reviu .....	4
V. Metodologi Reviu .....	4
VI. Uraian Hasil Reviu .....	5
VII. Apresiasi .....	8

**LAPORAN HASIL REVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018**

**I. RINGKASAN EKSEKUTIF**

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai instruksi pimpinan, APIP Kota Tanjungbalai melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018. Reviu dilaksanakan pada saat penyusunan Laporan Kinerja oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa format, mekanisme penyusunan dan substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 belum seluruhnya menyajikan dan didukung dengan data/informasi yang memadai sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Dari hasil revidi tersebut di atas, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai disarankan untuk melakukan perbaikan pada :

1. Format Laporan Kinerja, agar :
  - menyajikan data penting IP secara keseluruhan termasuk analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud;
  - menyajikan upaya perbaikan ke depan;
  - menyajikan secara ringkas anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IP sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
  
2. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja, agar :
  - informasi yang disampaikan pada Laporan Kinerja didukung data yang memadai;
  - menetapkan SOP atau surat edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja;
  - menetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap perangkat daerah;
  - data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja dapat diyakini keandalannya;
  
3. Substansi Laporan Kinerja agar :
  - menyajikan perbandingan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (minimal 3 tahun terakhir) serta perbandingan dengan capaian nasional.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi Atas Laporan Kinerja;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### **III. TUJUAN REVIU**

Tujuan dilaksanakannya Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 adalah :

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tanjungbalai;
2. Untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi data/informasi Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

### **IV. RUANG LINGKUP REVIU**

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi laporan.

### **V. METODOLOGI REVIU**

1. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018.

3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 800/131/Insp/2019 tanggal 04 Maret 2019, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggungjawab	Susanto, SE	NIP. 19660308 198712 1 003
Wakil	Seri Lestari, SE	NIP. 19790816 200604 2 006
Penanggungjawab		
Dalnis/Supervisor	Siti Rugayah, SE	NIP. 19690901 200112 2 002
Ketua Tim	Uly Artha Siburian, SE	NIP. 19830401 200604 2 008
Anggota Tim	1. Suwarno, S.Kom	NIP. 19840424 201001 1 040
	2. Zunairoh, SE	NIP. 19831008 201001 2 028
	3. Binur Samosir, SH, SE	NIP. 19670225 199303 1 001
	4. Rohmat Hidayat, A.Md	NIP. 19850810 201001 1 032

4. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 04 s.d. 25 Maret 2018.

## VI. URAIAN HASIL REVIU

Hasil penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

### 1. FORMAT

- Laporan Kinerja belum menampilkan seluruh data penting IP, yaitu tidak terdapat analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
- Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai ;
- Laporan Kinerja telah disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- Laporan kinerja belum menyajikan upaya perbaikan kedepan;
- Laporan kinerja belum seluruhnya menyajikan akuntabilitas keuangan, hanya menampilkan realisasi anggaran Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018.

Tidak terdapat ringkasan anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IP sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **2. MEKANISME PENYUSUNAN**

- a) Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu yaitu Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;
- b) Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum didukung dengan data yang memadai;
- c) Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun laporan kinerja belum memadai karena belum adanya SOP atau Surat Edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari perangkat daerah ke unit penyusun Laporan Kinerja;
- d) Penanggungjawab pengumpulan data/informasi belum ditetapkan di setiap perangkat daerah;
- e) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum diyakini keandalannya;
- f) Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja diketahui oleh unit kerja terkait.

## **3. SUBSTANSI**

- a) Tujuan /sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- b) Tujuan /sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021;
- c) Indikator kinerja tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021;

d) Indikator Kinerja Utama belum cukup mengukur tujuan/sasaran, antara lain :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator yang harus disajikan</b>	<b>Sumber</b>
Sasaran 1) <b>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan</b>	Tingkat maturitas SPIP	Penilaian BPKP
Sasaran 2) <b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Penilaian Ombudsman

- e) Hanya terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu dan tidak terdapat perbandingan data dengan nasional.
- f) Indikator Kinerja sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART:

## VII. APRESIASI

APIP Kota Tanjungbalai menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018.

Tanjungbalai, 25 Maret 2019

**INSPEKTUR DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI**



**SUSANTO, SE**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19660308 198712 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN 2018**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	- Opini BPK terhadap LKPD	WTP
		- Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Baik (B) / (62,5)
		- Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	85
		- Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	6
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota (%)	60 %
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	- Jumlah konflik Sara	0
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	- PDRB ADHK (Rp.juta)	5.485.438,30
		- PDRB ADHB (Rp.juta)	8.531.220,04
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	- Tingkat pengangguran terbuka	8,10 %
		- Nilai investasi (Rp.000)	19.835.113
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	- Pertumbuhan ekonomi	5,85 %
		- PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)	31.493,52
		- IPM	68,65
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas.	- APK (%)	
		PAUD	9,00 %
		SD/MI	100,75 %
		SMP/MTs	99,5 %
		- APM (%)	
		SD/MI	91,28 %
		SMP/MTs	83,33 %
		- Angka putus sekolah	
SD/MI	0,18		
SMP/MTs	0,20		

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1	2	3	4
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia Harapan Hidup</li> <li>- Persentase penurunan jumlah kematian Ibu (%)</li> <li>- Persentase penurunan jumlah Jumlah kematian bayi (%)</li> <li>- penurunan jumlah kematian balita (%)</li> <li>- Prevalensi Penurunan kasus gizi buruk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>72%</li> <li>2 %</li> <li>6%</li> <li>6%</li> <li>0,03%</li> </ul>
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Tanjungbalai bebas banjir</li> <li>- Persentase penataan kawasan kumuh</li> <li>- Persentase penduduk pengguna air bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>75 %</li> <li>60 %</li> <li>77,77 %</li> </ul>
10	Meningkatnya penataan kawasan kota yang yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai</li> <li>- Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan</li> <li>- indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>86 %</li> <li>0,329%</li> <li>kategori sangat kurang (indeks 57,0)</li> </ul>
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesadaran politik masyarakat</li> <li>- Jumlah demo yang berakhir ricuh</li> <li>- Persentase penurunan angka kriminalitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70 %</li> <li>0</li> <li>20%</li> </ul>
12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan Angka kemiskinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11,74 %</li> </ul>

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN 2018**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3		4		
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	- Opini BPK terhadap LKPD - Tingkat Akuntabilitas Kinerja - Persentase SKPD yang menerapkan SPIP - Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	Persen Baik Persen nilai	WTP B 85 6	WDP (B) 26,5 24	75% 100 31,17 0%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota (%)	Persen	60 %	82,53	137,55
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	- Jumlah konflik Sara	persen	0	0	100
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	- PDRB ADHK (Rp.juta) - PDRB ADHB (Rp.juta)	juta juta	5.485.438,30 8.531.220,04	5.174.845,42 7.424.964,63	94,33% 87,03%
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	- Tingkat pengangguran terbuka - Nilai investasi (Rp.000)	persen nilai	8,10 19.835.113	5,5 21.310.000	147% 107,43%
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	- Pertumbuhan ekonomi - PDRB/Kapita ADHK (Rp.000) - IPM	persen persen persen	5,85 31.493,52 68,65	5,51 30.229.195 67,41	94,18% 95,98% 98,19%
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas.	- APK (%) PAUD SD/MI SMP/MTs	 persen persen persen	 9,00 100,75 99,5	 15,68 106,49 102,62	 174,22% 105,70% 103,13%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3		4		
		- APM (%)				
		SD/MI	persen	91,28	98,43	107,83%
		SMP/MTs	persen	83,33	66,47	79,77%
		- Angka putus sekolah				
		SD/MI	persen	0,18	0,29	62,06%
		SMP/MTs	persen	0,20	1,41	14,18%
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	- Usia Harapan Hidup	persen	72	60	83,3%
		- Persentase penurunan jumlah kematian Ibu (%)	persen	2	1,3	153%
		- Persentase penurunan jumlah Jumlah kematian bayi (%)	persen	6	9,13	70%
		- penurunan jumlah kematian balita (%)	persen	6	17,48	30%
		- Prevalensi Penurunan kasus gizi buruk	persen	0,03	0,03	100%
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	- Kota Tanjungbalai bebas banjir	persen	75	89,76	119,68%
		- Persentase penataan kawasan kumuh	persen	50	40	66,66%
		- Persentase penduduk pengguna air bersih	persen	77,77	100	128,58%
10	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	- Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai	persen	86	86	100%
		- Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	persen	0,329	1,05	319%
		- indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai	persen	kategori sangat kurang (indeks	kategori sangat kurang (indeks 57,0)	100%
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.	- Peningkatan kesadaran politik masyarakat	persen	70	59,05	84,35%
		- Jumlah demo yang berakhir ricuh	kali	0	0	100%
		- Persentase penurunan angka kriminalitas	kasus	20	0	0%
12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.	- Penurunan angka kemiskinan	persen	11,74	14,64	80,19%



